

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha Pemberian kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi kehidupan yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan sosial suatu individu, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Beberapa dimensi kesejahteraan sosial melibatkan Pemberian kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial bukan hanya berbicara tentang aspek material saja, melainkan juga melibatkan aspek-aspek emosional, psikologis, dan sosial lainnya. Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sistem sumber dan peluang yang tersedia sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai kesejahteraan sosial adalah dengan melibatkan peran dari organisasi-organisasi

pelayanan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara efektif dapat bekerja sama dengan sistem sumber terkait dalam memenuhi kebutuhan sosial individu, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana individu mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat memberikan dampak yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut Friedlander (1980) dalam (Fahrudin, 2014) adalah

Kesejahteraan sosial merujuk pada suatu sistem terstruktur yang melibatkan berbagai layanan sosial dan lembaga-lembaga yang diformat untuk memberikan pelayanan kepada individu dan kelompok. Tujuan utamanya adalah mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai serta hubungan personal dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi dan kesejahteraan secara menyeluruh, sejalan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat tempat mereka berada.

Dari definisi yang sudah dijelaskan tersebut bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk memfasilitasi relasi-relasi personal dan sosial agar individu dapat mengembangkan potensi dan kesejahteraannya secara penuh. Hal ini diharapkan dapat selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat serta menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan optimal baik secara individu maupun secara kolektif.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley, 2004).

Schneiderman (1972) seperti yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 10) menyatakan bahwa sistem kesejahteraan sosial memiliki tiga tujuan utama yang dalam sebagian besar program kesejahteraan sosial tercermin, yakni memelihara sistem, mengawasi sistem, dan merubah sistem. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga tujuan utama tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Sistem

Memelihara dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan nilai-nilai, norma sosial, dan aturan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat merupakan aspek yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup. Hal tersebut mencakup motivasi untuk kelangsungan hidup individu dalam konteks perorangan, kelompok, maupun masyarakat. Kegiatan dalam sistem kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mencapai tujuan semacam itu melibatkan aktivitas sosialisasi terhadap norma-norma yang diterima, peningkatan pengetahuan, dan pengembangan kemampuan untuk menggunakan sumber daya dan peluang yang tersedia di masyarakat melalui penyediaan informasi, nasihat, dan panduan, termasuk penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

b. Pengawasan Sistem

Mengawasi perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial secara efektif adalah suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai pemeliharaan nilai-nilai masyarakat. Dalam kerangka kesejahteraan sosial, aktivitas-aktivitas yang mendukung tujuan ini mencakup fungsi-fungsi pemeliharaan seperti kompensasi, sosialisasi, dan peningkatan kemampuan untuk mengakses fasilitas-

fasilitas yang ada, terutama bagi kelompok masyarakat yang menunjukkan perilaku menyimpang.

c. Perubahan Sistem

Melakukan perubahan menuju perkembangan sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sistem kesejahteraan sosial (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam melakukan perubahan ini, sistem kesejahteraan sosial berperan sebagai instrumen untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi penuh dan adil bagi anggota masyarakat. Pemberian keputusan yang melibatkan masyarakat, distribusi sumber daya yang lebih adil dan proporsional, serta pemanfaatan struktur peluang yang tersedia secara merata, semuanya menjadi fokus dalam tindakan sistem kesejahteraan sosial.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari fungsi-fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk mengatasi atau mengurangi dampak tekanan yang muncul akibat perubahan sosio-ekonomi, mencegah munculnya konsekuensi sosial yang negatif sebagai hasil dari pembangunan, dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung peningkatan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam

masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas bahwa fungsi-fungsi yang mendukung kesejahteraan sosial yaitu bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah sosial yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial secara mandiri.

2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Adi (2005:51) pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi Sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.

2. Pekerjaan sosial

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi Sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

4. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana

pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

2.1.5 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial atau *social service services* pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial atau *social service*. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa “Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Sementara dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam usaha kesejahteraan sosial pekerjaan sosial memegang peranan sentral yaitu “*meta-institution*” (Siporin, 1975). Hal ini menegaskan bahwa dalam usaha kesejahteraan sosial baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung maka profesi pekerjaan sosial merupakan profesi utama di dalamnya (Fahrudin, 2014).

2.1.6 Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri dan tujuan tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Disebutkan oleh Fahrudin (2014), beberapa komponen yang di maksud adalah :

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2, Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dan dan sumber merupakan tanggung jawab pemerintah ddan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan Perundang-Undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses, pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6. Peran Serta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.2 Tinjauan Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan yang bersifat profesional dengan fokus pada penyediaan layanan sosial agar individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosial mereka secara efektif. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) pekerjaan sosial dalam (Fahrudin, 2014) dirumuskan sebagai berikut :

Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors. (Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik kerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu profesi pertolongan profesional yang memiliki tujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan umum dari praktik pekerjaan sosial adalah memberikan pertolongan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai potensi penuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Praktik pekerjaan sosial berfokus pada pemberdayaan klien, pengurangan ketidaksetaraan, dan perbaikan kondisi sosial. Adapun tujuan pekerjaan sosial dalam (Pujileksono, 2018) adalah :

1. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah (*to enhance the problem-solving and coping capacities of people*).
2. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan, dan kesempatan (*link people with systems that provide them with resources, services, and oportunities*).
3. Meningkatkan efektivitas operasional secara manusiawi (*promote the effective and humane operation of these systems*).
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (*contribute of the development and emprovenment of social policy*).

2.2.3 Peran Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi pemberian bantuan kepada individu, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Peran pekerjaan sosial tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan kepada masyarakat saja, tetapi juga melibatkan pelaksanaan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995: 22-27) bahwa :

a. Sebagai Pemercepat Perubahan (*Enabler*)

Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk Pemberian kebutuhannya.

b. Peran Sebagai Perantara (*Broker*)

Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat.

c. Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga ahli (*Expert*)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat).

e. Perencana sosial (*Social Planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah Pemberian kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Adapun peranan lain dari pekejaan sosial juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2011: 163) mengungkapkan bahwa:

a. *Enabler*

Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah mereka yang mereka hadapi secara lebih efektif.

b. *Broker*

Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.

c. *Expert*

Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.

d. *Social Planner*

Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.

e. *Advocat*

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer* atau *community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.

d. *Activist*

Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*).

2.2.4 Intervensi Pekerjaan Sosial

Mengacu pada tahap-tahap intervensi pekerjaan sosial melalui proses pertolongan dalam beberapa bagian sistem sosial seperti yang diungkapkan oleh Siporin dalam Iskandar (2013:65), sebagai berikut :

a. Tahap *Engagement, Intake* dan Kontrak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode- metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

b. Tahap *Assesment*

Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien.

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut,

d. Tahap Melaksanakan Program

Berdasarkan rencana intervensi Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien .Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

e. Tahap Evaluasi

Pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

f. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan- alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Penjelasan mengenai enam intervensi pekerjaan sosial di atas adalah serangkaian tahapan yang perlu dipahami oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami permasalahan. Tujuan dari intervensi ini adalah agar masalah yang dihadapi oleh klien dapat dipecahkan dan diselesaikan secara efektif, baik antara klien satu dengan klien yang lain.

2.2.5 Kerangka Pekerjaan Sosial

Kerangka pekerjaan sosial terdiri dari tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dan diperinci dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut diantaranya adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai (Zastrow, 2010) dalam (Isbandi, 2013) :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah kumpulan informasi, fakta, dan pemahaman yang dimiliki atau diperoleh oleh seseorang melalui pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan sekitarnya. Pengetahuan dapat bersifat teoritis atau praktis, serta dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, atau meningkatkan pemahaman. Menurut pendapat Kahn (1969) pengetahuan adalah pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang ilmu pengetahuan (*science*); belajar; dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan. Sedangkan Allen dan Anne Minahan dalam Zastrow (2010 : 97) melihat pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara ilmiah sehingga hasilnya telah diverifikasi terlebih dahulu, serta dapat diverifikasi oleh mereka yang ingin menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut (Isbandi, 2013).

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah suatu kemampuan yang dinilai sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (*helping profession*), serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara definitif, keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan atau kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan. Keterampilan tidak dapat muncul dengan sendirinya tetapi keterampilan muncul karena adanya suatu keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang individu. Hal tersebut dapat dianalogikan jika semakin malas seorang individu mempelajari berbagai pengetahuan terkait dengan praktik sehari-hari yang dihadapi dalam kehidupannya maka semakin sulit alternatif pemecahan masalah yang bisa ia berikan.

3. Nilai (*Value*)

Nilai adalah prinsip, keyakinan, atau standar yang dianggap penting atau dihargai oleh individu ataupun kelompok. Nilai merupakan pembentuk dasar bagi perilaku, keputusan, dan pandangan hidup bagi individu. Nilai juga dianggap mencakup moral, etika, kejujuran, integritas, keadilan, solidaritas, dan sebagainya. Nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia (*values are beliefs, preferences, or assumptions about what is desirable or good for [humans]*). Nilai tidak hanya membentuk karakter dan sikap individu, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam dinamika interaksi sosial di lingkungan masyarakat (Pincus dan Minahan, 1973: 38) dalam (Isbandi, 2013)

Dengan demikian, nilai mencerminkan aspirasi dan tujuan kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap individu. Konsep kesejahteraan sosial didasarkan pada nilai dan mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosialnya.

2.3 Tinjauan Pelayanan Sosial

2.3.1 Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merujuk pada pemberian dukungan oleh pihak terkait dengan tujuan mengatasi masalah sosial, memperbaiki fungsi sosial, dan mengurangi konflik sosial, baik yang bersifat patologis, maupun non-patologis. Pelayanan ini diberikan dengan dukungan penuh dari pemerintah, instansi, dan lembaga-lembaga terkait, dengan harapan mencapai hasil positif yang mendorong

perubahan dalam masyarakat. Pelayanan sosial menurut Kahn, (Fahrudin, 2014:51)

adalah :

Pelayanan sosial dapat diartikan dalam konteks kelembagaan sebagai rangkaian program yang disusun berdasarkan kriteria tertentu selain kriteria pasar. Program-program ini dirancang untuk menjamin penyediaan dasar-dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan fungsionalitas individu. Pelayanan sosial ini bertujuan mempermudah akses masyarakat umum ke berbagai layanan dan lembaga, serta memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan dan kebutuhan.

Dalam konteks ini, organisasi atau lembaga sosial terkait yang mengambil inisiatif dan memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan. Layanan ini melibatkan bantuan dalam mengembangkan potensi setiap individu agar individu tersebut dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat dan mendapatkan keberfungsian sosialnya kembali.

2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial pada dasarnya adalah suatu program atau kegiatan yang secara konkret dirancang khusus untuk menanggapi masalah, kebutuhan masyarakat, atau meningkatkan kondisi individu, keluarga, kelompok dalam komunitas, atau bahkan keseluruhan komunitas. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan kehidupan yang didambakan oleh masyarakat, tidak akan tercapai tanpa adanya upaya pengembangan kesejahteraan sosial. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi, maupun sektor bisnis dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial pada setiap individu, keluarga, kelompok dalam komunitas.

Menurut Kahn (Fahrudin, 2014:55) pelayanan sosial mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Pelayanan sosial untuk proses sosialisasi dan pengembangan diselenggarakan dengan tujuan melindungi, menginisiasi perubahan, atau meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi dan fungsi diri individu. Hal ini bertujuan membentuk identitas yang dimiliki oleh individu di dalam lingkungan keluarga.
- 2) Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi diberikan dengan maksud memberikan bantuan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang menghadapi masalah sosial, baik itu bersifat fisik maupun non-fisik. Layanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, dan memulihkan kepercayaan diri.
- 3) Pelayanan sosial untuk memperoleh akses, informasi, dan nasehat mencakup memberikan informasi terkait masalah yang dihadapi individu dalam lingkungan keluarga. Pelayanan ini memberikan arahan dan petunjuk mengenai tindakan selanjutnya yang harus diambil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial berfungsi untuk mengembangkan potensi dan fungsi diri sendiri, memberikan bantuan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial. Selain itu, pelayanan sosial juga berperan sebagai sumber informasi terkait masalah yang dihadapi individu, baik itu dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga.

2.4 Intervensi Sosial Pada Level Organisasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan atau mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat dilaksanakan melalui campur tangan komunitas lokal, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak penerima manfaat. Strategi utama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, umumnya didasarkan pada usaha untuk mengoptimalkan fungsi manajemen. Adapun fungsi manajemen dalam (Isbandi, 2013) :

1) Perencanaan

Dalam konteks pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial saat ini, perencanaan diakui sebagai salah satu elemen yang krusial dalam mengembangkan penyediaan layanan yang efektif bagi klien atau kelompok sasaran.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Pengorganisasian juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan atau *actuating* adalah peran dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan menjadi bentuk implementasi dari rencana, berbeda dari perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi.

4) Pengawasan

Pengawasan dalam suatu organisasi umumnya terkait dengan proses pemantauan dan evaluasi. Pemantauan juga dikenal sebagai evaluasi proses, sedangkan evaluasi memiliki dua makna yang berbeda. Ketika istilah evaluasi digunakan bersamaan dengan pemantauan, maka evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi hasil. Di sisi lain, jika kata evaluasi digunakan tanpa diikuti oleh kata

pemantauan, evaluasi dapat merujuk kepada evaluasi masukan, evaluasi proses, atau evaluasi hasil.

2.5 Tinjauan Pengembangan Kapasitas

2.5.1 Definisi Pengembangan Kapasitas

Menurut Milen (2004: 12), kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsinya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan, atau sektor, serta sistem yang lebih luas, untuk menjalankan fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan (Morgan dalam Haryanto, 2014: 14).

Brown (dalam Haryanto, 2014: 19) mendefinisikan pengembangan kapasitas dijelaskan sebagai proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Grindle mendefinisikan pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah usaha yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu, efektivitas mencakup ketepatan usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan responsivitas merujuk pada kemampuan untuk

menyelaraskan kebutuhan dengan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Menurut Morrison (2001 : 23) bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah sebuah rangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam kinerja. Lebih lanjut Morrison mengatakan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses belajar yang dimulai dari menyadari kebutuhan akan pengalaman, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam kehidupan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Berdasarkan berbagai pemaparan tentang pengembangan kapasitas di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau komunitas untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, output, dan outcome yang telah ditetapkan.

2.5.2 Tujuan Pengembangan Kapasitas

Menurut Morrison (2001 : 23) bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah sebuah rangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam kinerja. Lebih lanjut Morrison mengatakan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses belajar yang dimulai dari menyadari kebutuhan akan pengalaman, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam kehidupan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Morrison tersebut mengindikasikan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni :

a. Secara umum, hal tersebut diasosiasikan dengan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan dari suatu sistem.

b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek :

1) Efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu atau *outcome*.

2) Efektivitas mencakup sejauh mana upaya yang dilakukan sebanding dengan hasil yang diharapkan.

3) Responsivitas adalah tentang bagaimana menyelaraskan antara kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Pembelajaran yang tercermin dalam kinerja individu, kelompok, organisasi, dan sistem.

Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem dalam belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi perubahan yang kompleks (Ife & Tesoriero, 2008).

Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk mengelola perubahan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (UNDP, 1999).

2.5.3 Dimensi dan Tingkatan Pengembangan Kapastias (*Capacity Building*)

Dalam meningkatkan kemampuan individu dan organisasi, tingkat kompetensi atau kapasitas seseorang dapat dinilai menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Gross. Pendekatan yang digagas oleh Gross ini menyatakan bahwa ada sejumlah kompetensi yang diperlukan oleh instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dan pembangunan yaitu :

- 1) Pengetahuan meliputi : Pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengalaman kerja dan organisasi, pemahaman konsep administrasi dan metode, serta pemahaman diri.
- 2) Kemampuan meliputi : Manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, organisasi, pengendalian, kerja tim, penyelesaian konflik, intuisi, komunikasi, dan pembelajaran.
- 3) Tujuan meliputi : Orientasi bertindak, keyakinan pribadi, tanggung jawab, serta norma dan moralitas.

Sementara untuk menilai kapasitas pada tingkat organisasi, prinsip Polidano dianggap sesuai untuk diterapkan dalam sektor publik, yaitu pemerintahan. Terdapat tiga aspek kunci untuk mengevaluasi kapasitas sektor publik, yaitu:

- 1) *Policy Capacity*, yaitu mencakup kemampuan untuk merancang proses pengambilan keputusan, mengoordinasikan kerja sama antar badan pemerintah, dan menyajikan analisis terhadap keputusan yang diambil.
- 2) *Implementation authority*, ini merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan, baik pada tingkat individu maupun pada masyarakat

secara keseluruhan, serta kemampuan untuk memastikan bahwa layanan publik diterima dengan baik oleh masyarakat.

3) *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk menyediakan layanan publik dengan efektif dan efisien, serta mencapai standar kualitas yang memadai.

2.5.4 Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pengembangan Kapasitas

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program pengembangan kapasitas. Secara khusus Soeprapto menyatakan bahwa faktor-faktor penting yang memengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan sangat penting dalam menentukan keberhasilan program pengembangan kapasitas institusional. Kepemimpinan yang kondusif merupakan faktor utama yang memengaruhi kesuksesan program tersebut. Organisasi perlu terus mendorong terciptanya mekanisme kepemimpinan yang dinamis dan adaptif, seperti yang dilakukan di sektor swasta. Kepemimpinan yang kondusif ditandai dengan adanya peluang yang luas bagi setiap komponen organisasi, termasuk sumber daya manusia, untuk melakukan inisiatif dalam pengembangan kapasitas guna mencapai tujuan organisasi.

b. Komitmen Bersama

Aspek komitmen bersama (*collective commitment*) melibatkan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kapasitas kelembagaan. Komitmen ini merupakan modal dasar

yang harus terus dikembangkan dan dipelihara dengan baik, karena menjadi landasan bagi semua kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.

c. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada dasarnya mengacu pada pengembangan lingkungan dan budaya yang mendukung pelaksanaan program kapasitas personal dan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Reformasi kelembagaan melibatkan dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola dengan baik untuk mendukung program pengembangan kapasitas, karena pengembangan kapasitas harus dimulai dengan mengidentifikasi kapasitas yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dari individu dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan kapasitas yang dimiliki. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan syarat utama untuk keberhasilan program pengembangan kapasitas.

2.5.5 Karakteristik Pengembangan Kapasitas

Menurut Gandara (2008 : 16) *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.
- b. Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal.
- c. Dibangun dari potensi yang telah ada.
- d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri.
- e. Mengurus masalah perubahan.

f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.

Pengembangan kapasitas adalah suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya tentang mencapai hasil tertentu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran yang terus-menerus, yang bertujuan untuk tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas bukanlah proses yang dimulai dari titik nol atau ketiadaan, tetapi dimulai dengan memperkuat potensi yang telah ada untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, organisasi, dan sistem agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terus-menerus. Pembangunan kapasitas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada satu bagian atau komponen sistem saja, tetapi mencakup semua komponen sistem secara holistik, karena bersifat multidimensi dan dinamis. Ini ditandai dengan aktivitas yang beragam serta merupakan proses pembelajaran untuk semua komponen sistem yang mengarah pada pencapaian kinerja bersama (kinerja kolektif).

2.5.6 Proses Pengembangan Kapasitas

Proses pengembangan kapasitas melibatkan strategi untuk mengelola input dan proses guna mencapai output dan outcome secara optimal, serta mengatur umpan balik sebagai langkah perbaikan untuk tahap selanjutnya.

Strategi pengelolaan input berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam menyediakan berbagai jenis, jumlah, dan kualitas sumber daya manusia dan non-

manusia yang siap digunakan saat diperlukan. Strategi pengelolaan proses melibatkan kemampuan organisasi dalam merancang, memproses, dan mengembangkan kebijakan, struktur organisasi, dan manajemen. Strategi pengelolaan umpan balik berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi hasil yang dicapai, mempelajari kelemahan atau kekurangan pada input dan proses, serta mengambil tindakan nyata untuk penyempurnaan dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi (Haryanto, 2014: 26).

2.6 Konsep Organisasi Pelayanan Sosial

Sebagai penyelenggara layanan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial pada masyarakat. Organisasi pelayanan sosial yang termasuk dalam kategori sektor publik di Indonesia melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan organisasi massa lainnya.

Pada dasarnya, layanan sosial merupakan inisiatif atau kegiatan yang dirancang untuk menanggapi permasalahan, kebutuhan, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. Layanan sosial dapat diprogramkan untuk memberikan dukungan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara umum. Organisasi Pelayanan Sosial (*Human Service Organization* atau HSO) menurut (Adi, 2015: 108) yaitu:

HSO bisa merupakan organisasi pemerintah (*government organizations*), organisasi non pemerintah (*non-government organizations*) maupun pihak

swasta (*private organizations*) yang memerhatikan (*concern*) dengan masalah-masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial dalam arti sempit (seperti masalah yang terkait dengan prostitusi, anak jalanan, tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita).

Dari uraian tersebut bisa dijelaskan bahwa layanan sosial diselenggarakan oleh suatu lembaga pelayanan sosial atau kemanusiaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat diakses melalui berbagai sektor seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau entitas swasta. HSO (*Human Service Organization*) merupakan organisasi yang berorientasi pada penyediaan pelayanan untuk kepentingan kemanusiaan.

2.7 Tinjauan Masalah Sosial

2.7.1 Definisi Masalah Sosial

Masalah sosial adalah kondisi yang dianggap sebagai ketidaksetujuan atau ketidakpuasan dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan yang dapat memengaruhi kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Masalah sosial melibatkan aspek-aspek seperti ekonomi, politik, budaya, kesehatan dan lainnya yang dapat memicu dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat baik itu jangka pendek, maupun jangka panjang.

Soerjono Soekanto, dalam menjelaskan masalah sosial berpendapat bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.

2.7.2 Penyebab Masalah Sosial

Perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada dan bersumber dari masalah sosial seperti proses sosial dan bencana alam. Identifikasi masalah sosial dalam masyarakat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang khusus, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan entitas lainnya. Menurut Horald A. Phepls ada empat faktor sumber terjadinya masalah sosial yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah elemen ketidaksesuaian makhluk sosial, baik pada tingkat individu maupun kelompok sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama dalam aspek materi. Permasalahan ekonomi tidak hanya mencerminkan kondisi kekurangan dalam Pemberian kebutuhan, melainkan juga melibatkan klasifikasi produksi dan distribusi yang memengaruhi keadaan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan kelompok sosial atau masyarakat. Masalah ekonomi yang berasal dari faktor ekonomi dapat mengakibatkan ketidakcukupan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Beberapa masalah sosial yang berakar dari faktor ekonomi mencakup kemiskinan, kriminalitas atau kejahatan, dan pengangguran.

b. Faktor Biologis

Faktor biologis merujuk pada masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian kondisi lingkungan serta menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan antara masyarakat dan kondisi tersebut. Faktor biologis ini terkait dengan

kondisi fisik manusia, terutama dalam konteks kesehatan, dan dapat menghasilkan masalah sosial karena kurangnya pemahaman ilmiah, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta kendala ekonomi. Dampak masalah sosial yang muncul akibat faktor biologis mencakup gizi buruk, penyebaran penyakit menular, wabah penyakit, dan munculnya virus penyakit baru.

c. Faktor Psikologis

Masalah sosial yang berasal dari faktor psikologis terkait dengan pola pikir individu atau kelompok masyarakat yang merasa rendah diri terhadap struktur yang ada dalam kehidupan sosial. Akar masalah sosial ini dapat ditemukan dalam kurangnya peran orang tua dalam perkembangan anak, kurangnya dukungan lingkungan terhadap keyakinan agama atau negara, serta pengaruh faktor-faktor sekitarnya. Masalah sosial yang muncul dari aspek psikologis ini dapat dipicu oleh ketidakmampuan individu untuk membedakan antara benar dan salah sehingga menyebabkan beban hidup yang terlalu berat, depresi, diskoordinasi jiwa, dan bahkan bunuh diri.

d. Faktor Kebudayaan

Masalah sosial yang berasal dari faktor kebudayaan mencakup keadaan sosial dalam masyarakat yang melibatkan struktur sosial, proses sosial, pola interaksi, dan elemen-elemen lainnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang memengaruhi munculnya masalah sosial. Akar masalah sosial dari faktor budaya timbul ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam memilih antara

nilai dan norma yang dianggap baik, terutama seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

2.7.3 Dampak Masalah Sosial

Masalah sosial dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada tatanan kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari masalah sosial dapat bervariasi tergantung pada jenis masalahnya. Berikut beberapa dampak dari masalah sosial :

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang mencakup rendahnya standar hidup individu, seperti keterbatasan pendapatan ekonomi, kurangnya pelayanan kesehatan yang memadai, masalah gizi pada anak-anak, dan buruknya kualitas pendidikan yang didapatkan. Secara garis besar, gagasan tentang kemiskinan bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. (Bappenas, 2018). Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kebutuhan dasar ini sering kali diidentifikasi sebagai garis kemiskinan dan mereka yang memiliki pendapatan di bawah garis tersebut dianggap sebagai penduduk miskin. Disisi lain, kemiskinan relatif terjadi karena dampak kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak merata sehingga menyebabkan beberapa individu menjadi relatif lebih miskin daripada yang lain dalam masyarakat.

2. Kriminalitas

Kejahatan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam dinamika sosial pada masyarakat. Penyebab dari kriminalitas ini meliputi ketidakseimbangan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya luar yang dapat memengaruhi anggota masyarakat untuk menyimpang dari norma yang ada, terutama di lingkungan sosial yang berperan penting dalam membentuk karakter perilaku kriminal. Adapun penyebab lain dari kriminalitas ini adalah dinamika kondisi sosial atau ekonomi, menyempitnya lapangan pekerjaan, gaya kepemimpinan yang tidak efektif, tingginya tingkat korupsi, masalah kesehatan mental, serta berbagai masalah sosial lainnya. Jika kriminalitas tidak diselesaikan tentunya akan menimbulkan masalah sosial lainnya yang lebih besar dan dapat meresahkan kehidupan masyarakat.

3. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merujuk pada status sosial diantara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Tentunya hal ini mencakup perbedaan dalam pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, akses terhadap layanan publik, dan keadilan sosial.

4. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi keluarga adalah kondisi di mana struktur dan fungsi keluarga mengalami ketidakstabilan, kekacauan, dan gangguan yang signifikan. Penyebab terjadinya disorganisasi keluarga disebabkan karena berbagai faktor, termasuk konflik antara anggota keluarga, kurangnya komunikasi yang efektif, kekurangan

dukungan emosional, masalah finansial, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian.

Disorganisasi keluarga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah seperti rendahnya kesejahteraan emosional, penurunan prestasi akademik, gangguan perilaku, dan masalah kesehatan mental.

2.8 Tinjauan Posyandu

2.8.1 Pengertian Posyandu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.

UKBM adalah sarana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.

2.8.2 Tujuan Posyandu

1. Tujuan Umum

Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

A) Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

B) Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

C) Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

2.8.3 Sasaran Posyandu

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya:

1. Bayi

2. Anak balita

3. Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui

4. Pasangan Usia Subur (PUS)

2.8.4 Kedudukan Posyandu

1) Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintahan Desa atau Kelurahan

Pemerintahan desa atau kelurahan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di desa atau kelurahan. Kedudukan posyandu terhadap pemerintahan desa atau kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

2) Kedudukan Posyandu Terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu

Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan atau pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa atau kelurahan. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.

3) Kedudukan Posyandu Terhadap Berbagai UKBM

UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang salah satu di antaranya adalah Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan atau LSM desa atau kelurahan yang bergerak di bidang kesehatan adalah sebagai mitra.

2.8.5 Pengorganisasian Posyandu

Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan posyandu. Struktur organisasi tersebut bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta kader posyandu yang merangkap sebagai anggota.

2.8.6 Pembentukan Posyandu

Posyandu dibentuk oleh masyarakat desa atau kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat. Pendirian Posyandu ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa atau lurah setempat.

2.9 Tinjauan Stunting

2.9.1 Definisi Stunting

Stunting merujuk pada keadaan gagal tumbuh pada anak yang berusia di bawah lima tahun yang disebabkan oleh kombinasi kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting dapat dijelaskan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi dan pengasuhan yang tidak memadai dari orang tua dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, anak mengalami keterlambatan pertumbuhan, terlihat dari tinggi badannya yang lebih pendek dibandingkan dengan anak sebaya, dan juga dapat mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif (Kemenkes RI, 2018b).

Menurut UNICEF (2013) stunting dianggap sebagai gangguan pertumbuhan yang tidak dapat dipulihkan karena kurangnya asupan zat gizi yang memadai dan paparan infeksi yang berulang. Stunting mencerminkan adanya gangguan pertumbuhan linear yang terjadi karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Anak yang mengalami stunting, khususnya pada usia dini, berisiko

mengalami gangguan pertumbuhan pada organ lain, termasuk otak (Endang et al., 2020).

2.9.2 Penyebab Stunting

Stunting disebabkan bukan hanya oleh kurangnya asupan gizi selama kehamilan sang ibu, melainkan juga oleh sejumlah faktor multi dimensi. Beberapa faktor langsung yang menyebabkan stunting meliputi :

A) Penyebab Dasar

1) Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua akan menyebabkan sang ibu sulit untuk memahami Pemberian gizi anaknya. Orang tua yang memiliki kesulitan memahami tentang kesehatan dan asupan gizi anak dapat menyebabkan kurangnya perilaku yang mendukung gizi dan kesehatan yang baik. Misalnya, kebiasaan mengonsumsi nasi dengan lauk mie instan, kurangnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah buang air besar atau sebelum makan, dan ketidakbiasaan memberikan alas kaki kepada anak saat berada di luar rumah atau di tempat kotor. Selain itu, kesulitan menyediakan makanan bergizi untuk anggota keluarga, terutama anak-anak, juga dapat terjadi, terutama pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah yang mungkin tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang baik dan bergizi (Prendergast & Humphrey, 2014).

2) Status Ekonomi

Pendapatan yang rendah dapat menyebabkan tidak optimalnya Pemberian asupan gizi pada anak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting (Krisnana et al., 2020). Keadaan ekonomi yang kurang baik tentunya akan mengakibatkan penurunan kualitas konsumsi pangan, terutama dalam hal pembelian sumber gizi berupa protein, vitamin, dan mineral. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya asupan zat gizi, meningkatkan risiko stunting (Nurmaliza and Herlina, 2019).

B) Penyebab Tidak Langsung

Faktor yang tidak langsung berperan dalam terjadinya stunting adalah faktor yang memengaruhi pola pemberian makan dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi pada balita (Lestari et al., 2018). Penyebab tidak langsung stunting terdiri dari faktor ketahanan pangan, pola asuh, dan kualitas pelayanan kesehatan yang buruk (Rohmawati & Antika, 2017).

1) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merujuk pada kondisi di mana semua rumah tangga memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Kurangnya pendapatan rumah tangga dapat mengakibatkan keterbatasan kemampuan keluarga dalam menyediakan pangan yang cukup dan bergizi. Ketahanan pangan memiliki dampak positif terhadap status gizi sehingga pertumbuhan balita dapat optimal (Aritonang et al., 2020). Ketahanan pangan mengacu pada ketersediaan pangan yang mencakup jumlah yang memadai, kualitas yang baik, keamanan, variasi, gizi yang mencukupi, distribusi yang merata, dan

harga yang terjangkau. Selain itu, kondisi ini juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Pemerintah RI, 2012).

2) Pola Asuh

Cara orang tua dalam merawat anak, termasuk dalam hal pemberian makan, dukungan emosional, dan stimulasi, menjadi cerminan dalam timbulnya stunting pada balita. Pola asuh merupakan serangkaian praktik yang dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan, memberikan makanan, memberikan dukungan emosional, serta memberikan rangsangan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memiliki pola asuh yang baik, dapat secara signifikan mendukung pencapaian status gizi yang optimal melalui perhatian dan perawatan yang diberikan oleh orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (Asrar et al., 2010).

3) Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang unggul adalah pelayanan kesehatan yang memperhatikan dan berfokus pada kebutuhan, harapan, serta nilai-nilai pelanggan sebagai dasar penyediaan pelayanan kesehatan. Masyarakat menginginkan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab, aman, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan,

serta melindungi hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan (Irmawati et al., 2017).

C) Penyebab Langsung

1) Konsumsi Zat Gizi Tidak Memadai

Kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang lama meningkatkan risiko terhambatnya pertumbuhan, karena pertumbuhan anak memerlukan asupan zat gizi yang memadai (Hidayati et al., 2016).

2) Penyakit Infeksi

Kekurangan asupan zat gizi dapat menyebabkan penyakit infeksi, sementara penyakit infeksi dapat meningkatkan risiko masalah gizi sehingga risiko terjadinya stunting akan semakin besar (Adriani, 2016). Zat gizi akan diberikan prioritas untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit, yang dapat mengakibatkan berhentinya atau perlambatan proses pertumbuhan.

2.9.3 Dampak Stunting

Stunting adalah bentuk malnutrisi kronis yang terjadi selama dalam kandungan dan pada dua tahun pertama kehidupan anak. Kondisi ini dapat menghasilkan penurunan tingkat kecerdasan dan kemampuan fisik, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan produktivitas, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan memperpanjang tingkat kemiskinan. Selain itu, dampak stunting juga dapat mencakup sistem kekebalan tubuh yang melemah, peningkatan risiko terhadap penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker, serta gangguan reproduksi maternal dimasa dewasa kelak.

Stunting dapat terjadi karena kurangnya asupan zat gizi dan infeksi berulang yang menyebabkan keterlambatan perkembangan fungsi kognitif dan kerusakan kognitif yang bersifat permanen. Pada wanita, stunting dapat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin selama kehamilan, menghambat proses persalinan, serta meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan penyakit kronis saat anak mencapai usia dewasa (Sandra Fikawati dkk, 2017).